

BAB IV

DAMPAK OPERASI SEROJA

Permasalahan di Timor Timur yang kemudian memunculkan sebuah operasi militer ini berbeda dengan operasi-operasi militer yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Operasi militer di Timor Timur melibatkan banyak negara-negara yang berkepentingan meskipun negara-negara tersebut tidak secara langsung terlibat dalam operasi militer yang tengah berlangsung di Timor Timur. Operasi militer di Indonesia biasanya hanya melibatkan internal Indonesia saja, lain halnya dengan operasi militer di Timor Timur. Negara-negara besar yang terlibat sebagai pendukung dalam operasi ini memberikan dukungan berupa bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Sebenarnya meski mereka tidak terlibat secara langsung, tetapi peran mereka sangat besar dalam konflik yang terjadi di Timor Timur. Ini merupakan permainan dari petinggi-petinggi negara-negara yang mempunyai kepentingan di Timor Timur. Di lain pihak, orang-orang yang terjun langsung dalam operasi militer ini adalah korban-korban dari permainan politik yang berlangsung pada masa Perang Dingin tersebut baik dari pihak ABRI, partai-partai yang bersengketa (Fretilin, UDT, Apodeti), maupun penduduk sipil Timor Timur yang merasakan secara langsung situasi menegangkan dalam perseteruan di Timor Timur. Operasi militer yang diberi sandi dengan nama Operasi Seroja ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi pelaku-pelaku maupun saksi dari operasi militer ini.

A. Dampak Internal Operasi Seroja

Pemberangkatan tugas dalam Operasi Seroja merupakan hal yang tidak dapat dielakkan oleh prajurit ABRI yang mendapatkan tugas untuk ikut diberangkatkan ke Timor Timur. Prajurit ABRI telah mendapatkan doktrin yang telah tertanam dalam disiplin militer yaitu, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

Prajurit yang sekali-kali melanggar disiplin militer maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ada. Prajurit ABRI telah terikat oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tersebut, sehingga prajurit harus menerima segala perintah. Meskipun demikian, nilai-nilai luhur Pancasila sudah terpupuk dalam diri prajurit ABRI yang mendukung serta membela Pancasila dan UUD 1945.¹ Bagi prajurit ABRI, operasi militer di Timor Timur ini merupakan tugas negara dan sudah kewajibannya untuk mengabdi kepada negara, mengingat ABRI merupakan alat kelengkapan negara yang berfungsi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setidaknya terdapat dua misi yang diemban oleh ABRI sejak masuk ke Timor Timur pada 1975, yaitu:²

1. Misi negara; ABRI menggelar operasi militer di Timor Timur bukan atas kebijakan intern ABRI semata, tetapi sebagai perpanjangan tangan Republik Indonesia (ABRI sebagai alat negara).

¹ Nugroho Notosusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, (Jakarta: IKAPI, 1985), hlm. 175.

² Zacky Anwar dkk, *Hari-Hari Terakhir Timor Timur: Sebuah Kesaksian*. (Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo, 2003), hlm. 220.

2. Misi kemanusiaan: ABRI hadir di Timor Timur untuk secara drastis mengeliminasi keadaan yang sungguh-sungguh mengancam aspek kemanusiaan akibat tindakan kekerasan kelompok-kelompok masyarakat Timor Timur yang bertikai.

Menurut Mayjen Benny Moerdani, serangan yang terjadi pada 7 Desember 1975 merupakan bencana militer, juga dalam perencanaan strateginya yang berubah-ubah. Pulau itu tidak bisa dimenangkan dalam serbuan kilat. Sebaliknya, pihak militer terlibat dalam perang yang tidak ada akhirnya.³ Operasi militer yang melibatkan ABRI secara langsung ini terus berkelanjutan. Timor Timur memang telah masuk menjadi propinsi termuda Indonesia, namun kontak senjata dan fisik antara ABRI dengan Fretilin terus berlangsung hingga pimpinan Fretilin, Nicolao Lobato tertembak mati dalam operasi ini. Tertembaknya Nicolao Lobato tidak serta merta menghentikan perlawanan Fretilin, beberapa pemberontakan masih sering terjadi di berbagai tempat dalam skala yang kecil.

Tugas yang diemban oleh prajurit ABRI di Timor Timur merupakan hal yang berat. Bagi prajurit-prajurit ABRI, mereka hanya melaksanakan perintah dari atasan tanpa mengetahui campur tangan internasional di dalamnya.⁴ Tugas ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada negara. Operasi Seroja juga mempunyai dampak positif bagi ABRI. Tugas ini dapat digunakan untuk mengukur

³ Monika Schlicher, *Timor Timur Menghadapi Masa Lalunya: Kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi*, (Aachen: Missio, 2006), hlm. 60.

⁴ Peltu (purn TNI) Kasbin, wawancara di Bekasi, 14 Januari 2014.

sejauh mana kemampuan dari kekuatan militer Indonesia, sebagai lahan untuk menguji coba senjata perang produksi dari PINDAD, dan untuk membuktikan jiwa kepatriotan dan mewujudkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat.⁵ Bagi prajurit-prajurit ABRI, penugasan di Timor Timur juga merupakan pengalaman perang yang tidak ternilai harganya, dalam hal ini merupakan penerapan-penerapan dari apa yang telah mereka pelajari ketika melakukan latihan-latihan perang.⁶

Di samping dampak positif tersebut ternyata Operasi Seroja justru banyak menghasilkan dampak negatif bagi prajurit ABRI. Tercatat dari pihak ABRI, pada tahun 1975 pejuang yang gugur dalam operasi seroja berjumlah 147 yang terdiri dari TNI AD 133 personil, TNI AL 13 personil, dan TNI AU 1 personil.⁷ Pada tahun 1976, jumlah personil yang gugur bertambah menjadi 351 yang terdiri dari 311 personil TNI AD, 25 personil TNI AL, 1 personil TNI AU, dan 14 personil dari POLRI. Pada tahun 1977 berjumlah 242 personil, dari TNI AD 178 personil, TNI AL 57 personil, TNI AU berjumlah 4 personil, dan 3 personil dari POLRI. Berdasarkan rekап data pejuang seroja yang gugur, tahun 1978 merupakan tahun yang paling banyak memakan korban dalam tubuh ABRI. Pada tahun ini, jumlah korban sebanyak

⁵ Pelda (Purn TNI) Lustiyawan, wawancara di Bekasi, 13 Januari 2014.

⁶ Totot Wahyu, PNS Pembina utama IV/e Wredatama, wawancara di Yogyakarta, 21 April 2014.

⁷ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. Monumen Seroja.

379 personil yang terdiri dari 349 personil TNI AD, 23 personil TNI AL, 3 personil dari TNI AU, dan 4 personil dari POLRI.⁸

Selain prajurit yang gugur, memang banyak prajurit yang kembali ke daerah asal dengan selamat, namun dari seluruh prajurit ABRI yang kembali ke daerah asal tidak semuanya kembali dalam keadaan utuh. Banyak dari prajurit ABRI yang harus kehilangan organ tubuhnya karena tembakan, ledakan granat, dan sebagainya. Beberapa prajurit selain mengalami cacat permanen, sebagian yang raganya masih utuh-pun ada yang mengalami gangguan pendengaran akibat adanya tembakan meriam.⁹

Korban-korban dari Operasi Seroja ini dapat ditemui di Perumahan Seroja yang berada di Bekasi, Jakarta, Medan, Bandung, dan Solo. Meskipun purnawirawan prajurit-prajurit ABRI ini mengalami cacat permanen, bagi mereka dan prajurit lain, tugas di Timor Timur ini merupakan sebuah pengalaman yang tidak ternilai harganya. Tentu hal ini juga memunculkan rasa kebanggaan bagi prajurit ABRI yang pernah terlibat di dalamnya karena tidak semua prajurit dapat merasakan bagaimana situasi peperangan yang demikian hebatnya.

Di lain pihak, Fretelin merupakan musuh paling utama bagi ABRI dan kelompok pro integrasi. Pertempuran antara ABRI dan Fretelin tidak semata-mata terus dimenangkan oleh satu pihak saja. Ada kalanya ABRI dan tenaga bantuannya terdesak, tetapi seringkali dari pihak Fretelin juga terdesak. Masing-masing mundur

⁸ Monika Schlicher, *loc.cit.*

⁹ Peltu (purn TNI) Hariyadi, wawancara di Magelang, tanggal 18 April 2014.

ke daerah yang aman untuk menyelamatkan diri. Kerugian yang dialami oleh keduanya hampir sama, yaitu anggota tewas, ditahan, ataupun dilucuti senjatanya. Situasi yang demikian ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah perang.

Adanya Operasi Seroja juga melumpuhkan sebagian kekuatan Fretilin. Kekuatan Fretilin sempat terpecah belah karena perbedaan pandangan antar pemimpinnya serta keinginan sebagian dari anggota yang ingin menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia, di samping ada juga yang ingin bertahan untuk terus melakukan perjuangannya. Perlakuan dari Fretilin terus berlangsung hingga terbunuhnya pimpinan Fretilin, Nicolao Lobato dalam Operasi Seroja menandai lumpuhnya kekuatan Fretilin di Timor Timur. Fretilin mengalami masa-masa yang sulit pada tahun 1978-1982 di mana pangkalan pendukungnya digempur dan dihancurkan oleh ABRI.¹⁰ Pada masa itu terjadi kefakuman kepemimpinan dan struktural dalam tubuh Fretilin. Fretilin hancur, basis dukungan dan sistem komunikasi porak poranda.¹¹ Pada waktu itu, lebih dari delapan puluh persen kekuatan perlawanan sudah patah, atau menyerahkan diri karena manipulasi pemimpin politik.¹² Meskipun demikian, anggota-anggota Fretilin yang tersisa

¹⁰ Aan Andrianto, “Peranan Partai Fretilin Dalam Kemerdekaan Timor Timur Tahun 1974-1998”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2009), hlm. 101.

¹¹ John G. Taylor, *Perang Tersembunyi: Sejarah Timor-Timur yang Dilupakan*, (Jakarta: FORTILOS, 1998), hlm. 202.

¹² Tri Agus S. Siswowihardjo, (ed), *Xanana Gusmao: Timor Leste Merdeka, Indonesia Bebas*, (t.k: Solidamor, 1999), hlm. 24.

mundur ke daerah-daerah terpencil. Perlawanan masih terjadi dalam skala kecil dan bersifat lokal.

Pimpinan Fretilin digantikan oleh Xanana Gusmao setelah Nicolau Lobato berhasil ditembak mati. Ternyata kepemimpinan Xanana Gusmao ini sedikit lebih lunak dibandingkan dengan Nicolau Lobato. Fretilin di bawah Xanana Gusmao mulai bersedia mengadakan dialog dengan ABRI, bahkan mengajukan rencana perdamaian dengan ABRI.¹³ Tindakan ini dilakukan oleh Xanana Gusmao selain untuk membangun kembali kekuatan Fretilin, Xanana juga menyadari Indonesia tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan militer, tetapi menggunakan politik. Sebagai pimpinan Fretilin, Xanana ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa perang masih terus berjalan dan menginginkan suatu penyelesaian yang menyeluruh, serta memperhitungkan kepentingan-kepentingan geostrategis di wilayah Timor Timur.¹⁴ Ke depannya, Fretilin mulai mengubah strategi untuk dapat segera melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara yang mandiri.

Operasi Seroja tidak dapat berjalan dengan mudah tanpa bantuan dari anggota-anggota partai yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Anggota-anggota UDT, Apodeti, Trabahista, dan KOTA menamakan diri mereka sebagai pasukan gabungan untuk melawan Fretilin. Pasukan gabungan ini yang membantu ABRI untuk dapat melumpuhkan kekuatan Fretilin. Pasukan gabungan yang juga

¹³ Daud Aris Tanudirjo dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 535.

¹⁴ Tri Agus S. Siswowihardjo, *loc.cit.*

terdiri dari rakyat yang disebut oleh ABRI sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi) ini kemudian dilatih dan diangkat menjadi hansip, sesuai dengan tingkatannya dan diberi gaji tetap layaknya seperti pegawai negeri sebagai satuan keamanan di Timor Timur.¹⁵

Sementara itu, setelah menguasai seluruh kota di Timor Timur, pimpinan partai-partai pro integrasi bekerja keras untuk dapat merealisasikan integrasi Timor Timur ke wilayah NKRI.¹⁶ Memang dalam prosesnya, dalam pengesahan integrasi Timor Timur sedikit dipersulit oleh Jakarta. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran Indonesia atas tuduhan-tuduhan dunia internasional dan untuk memastikan kesungguhan rakyat Timor Timur dalam penggabungan wilayah tersebut. Praktis saja, setelah Timor Timur resmi berintegrasi dengan Indonesia pada 17 Juli 1976, maka pimpinan-pimpinan pro integrasi menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan Timor Timur. Contohnya Arnaldo dos Reis Araujo (ketua Apodeti) menduduki jabatan sebagai gubernur Timor Timur, Lopes da Cruz (pimpinan UDT) diangkat sebagai wakil gubernur. Pada pertengahan tahun 1978, Arnaldo dos Reis Araujo digantikan oleh Guiherme Maria Goncalves pada tahun 1978. Goncalves

¹⁵ Pelda (Purn TNI) Djenthu Muhdjawat, wawancara di Magelang, 16 Maret 2014.

¹⁶ Fx Lopez da Cruz, *Kesaksian: Aku dan Timor Timur*, (Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, 1999), hlm. 99.

merupakan tokoh dari Apodeti dan berasal dari kalangan *liurai* yang menduduki jabatan sebagai gubernur Timor Timur sampai September 1983.¹⁷

Operasi Seroja kemudian menimbulkan pandangan berbeda bagi partai-partai politik yang bertikai. Bagi Fretilin, Operasi Seroja dapat dikatakan sebagai teror bagi partainya, namun bagi Domingos Soares, anggota Apodeti, keberadaan ABRI di Timor Timur tidak lain sebagai penjamin keamanan rakyat yang paling bisa dipercaya.¹⁸ Adanya pertikaian antara partai-partai politik tidak hanya menimbulkan perbedaan pandangan, tetapi juga mengakibatkan terpisahnya hubungan kekerabatan antar saudara yang mengikuti partai yang berbeda.

Pertikaian yang terjadi sejak berdirinya partai-partai politik yang merembet hingga perang saudara, dan puncaknya ketika Operasi Seroja menimbulkan ketakutan tersendiri dan perpecahan dalam masyarakat Timor Timur. Hal yang wajar ketika persaudaraan harus terputus akibat saling bersikeras memihak partai berbeda yang saling bersengketa. Salah satu contohnya adalah Maria Antonia Santos Sousa. Dia adalah wanita yang aktif di OPMT (Organisasi perempuan yang bernaung di bawah sayap Fretilin). Pada waktu itu tahun 1977 Fretilin menangkap seluruh anggota keluarganya, Maria dituduh sebagai pengkhianat. Ia diinterogasi dan disiksa. Ia

¹⁷ Daud Aris Tanudirdjo dkk, *op.cit.*, hlm. 536.

¹⁸ Zacky Anwar dkk, *op.cit.*, hlm. 160.

menyaksikan anggota keluarganya dan banyak orang lain yang tewas akibat penyiksaan dan kelaparan di penjara Fretilin tersebut.¹⁹

Masyarakat terpaksa harus mengungsi ke daerah yang aman untuk menyelamatkan diri dari serangan dan ketakutan. Biasanya mereka lari ke hutan atau gunung yang belum tersentuh oleh ABRI maupun Fretilin. Masyarakat sering mengalami kekurangan makanan akibat dari kontak senjata antara ABRI dengan Fretilin yang berdampak terhadap penghancuran bahan pangan misalnya lahan pertanian mereka. Tidak jarang dari masyarakat juga terkena sasaran perang saudara ini. Korban jiwa memang tidak hanya merenggut pasukan-pasukan yang berperang, tetapi masyarakat juga terkena imbasnya. Mereka juga terpaksa harus ikut andil dalam peperangan apabila sudah terkepung oleh salah satu pasukan. Masyarakat sipil secara keseluruhan mengalami serangan teror dan kekerasan yang sistematis.²⁰ Masyarakat melarikan diri ke pegunungan di mana mereka dapat bertahan hidup. Kebanyakan masyarakat sipil tewas pada awal-awal Operasi Seroja karena situasi yang masih demikian kacau. Berbeda halnya ketika berbagai daerah sudah dikontrol oleh ABRI, masyarakat sipil sudah mulai dapat dikendalikan, meskipun tidak menutup kemungkinan rasa was-was akan segala hal mengancam masyarakat tersebut.

¹⁹ Monika Schlicher, *op.cit.*, hlm 55.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

Keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai jaminan. Masyarakat yang berada di bawah bendera integrasi terancam oleh terror dari pasukan Fretilin, begitu pula sebaliknya. Siapapun yang ikut bersama dengan pasukan lawan, tandanya mereka masuk dalam kategori musuh baik bagi Fretilin maupun partai pro integrasi dan ABRI. Apabila terjadi serangan, masyarakat merasa ketakutan apabila terkena tembakan karena tembakan terjadi di mana-mana.²¹

Operasi Seroja yang terkesan sangat gencar ini tidak semuanya memberikan kesan negatif terhadap masyarakat di Timor Timur. Masyarakat Timor Timur yang demikian terbelakang akibat penjajahan Portugal ini kemudian dibina oleh ABRI dalam bagian komando territorial. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang menimbulkan peningkatan mutu di Timor Timur terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan ini dibantu oleh ABRI dan tenaga-tenaga lain yang dikirim oleh pemerintah Indonesia, meskipun pada awalnya semua dilaksanakan oleh ABRI. ABRI juga berperan sebagai pendidik, terutama apabila guru tidak hadir, maka ABRI yang mengajar baca tulis terutama untuk anak-anak, untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.²² ABRI tidak hanya memberikan pengajaran dalam pendidikan saja, tetapi juga mengajari cara bercocok tanam dengan benar. Di samping tetap harus menjaga wilayah yang sudah aman supaya tidak diserang kembali oleh Fretilin. Operasi Seroja yang telah berlangsung

²¹ Martinho da Costa, wawancara di Solo, 28 April 2014.

²² *Ibid.*,

selama 3 tahun ini telah menimbulkan banyak kerugian. Baik dari pihak ABRI, Fretilin, penduduk sipil, pemerintah Indonesia, maupun negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dijelaskan oleh Mari Alkatiri, tanpa campur tangan asing, tidak akan terjadi perang saudara di Timor Timur.²³

Di lain pihak, Timor Timur dipandang sebagai *trouble corner* (pojok bermasalah) bagi Indonesia. Kemungkinan ancaman terhadap keamanan Indonesia yang mungkin timbul dari perubahan politik yang terjadi di Timor Timur. Timor Timur yang tidak dapat berdiri sendiri di atas kekuatannya sendiri akan menggantungkan kepada pihak lain yang mempunyai tendensi-tendensi tertentu yang dapat membahayakan Indonesia.²⁴ Timor Timur dapat menjadi unsur dalam perhitungan strategi global negara-negara besar yang terkait dengan antagonisme mereka oleh karena letak yang strategis dari Timor Timur. Timbulnya konflik di wilayah tersebut merupakan potensi ancaman terhadap stabilitas Indonesia dan regional.²⁵ Kepentingan nasional Indonesia di Timor Timur memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam terhadap kemungkinan ancaman terhadap keamanan republik yang mungkin timbul dari perubahan politik yang tidak menentu di Timor

²³ Monika Schilcher, *op.cit.*, hlm. 69.

²⁴ Juli Suroso, “Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1976”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2008), hlm. 77.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

Timur.²⁶ Indonesia kemudian mengirimkan sukarelawan-sukarelawan ke Timor Timur untuk membantu pengintegrasian ke Indonesia melalui Operasi Seroja.

Operasi Seroja telah membantu mewujudkan keinginan sebagian rakyat Timor Timur untuk mencapai tujuan menjadi wilayah dari NKRI. Tercapainya tujuan tersebut menjadikan pekerjaan yang berat bagi pemerintah Indonesia. Indonesia harus segera melakukan perubahan dengan menciptakan perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut.²⁷ Indonesia mengeluarkan dana yang relatif banyak untuk Timor Timur, bahkan melebihi provinsi-provinsi lain guna mengejar ketertinggalan dan mengimbangi daerah-daerah lain. Indonesia telah mengucurkan dana sebesar 4 miliar rupiah selama bulan Juli 1976 hingga 3 Maret 1977. Dana ini digunakan untuk pembangunan perumahan, rumah sakit, gedung sekolah, serta proyek air minum dan listrik.²⁸ Upaya Indonesia ini justru mendapat tanggapan negatif baik dari lingkungan internasional maupun di kalangan rakyat Timor Timur sendiri karena keterlibatan ABRI dalam wilayah tersebut. Posisi Indonesia terpojok karena masalah Timor Timur dalam beberapa forum internasional.

Indonesia juga harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan atas integrasi Timor Timur dan menghapuskan Timor Timur dari daftar *non-self*

²⁶ Totok Hastihartono, “Integrasi Timor-Timur dalam Perspektif Konsepsi Politik Luar Negeri Republik Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: IKIP, 1992), hlm. 120.

²⁷ Zacky Anwar dkk, *op.cit.*, hlm. 63.

²⁸ Daud Aris Tanudirdjo, *loc.cit.*,

government territory (wilayah belum berpemerintahan sendiri). Indonesia juga harus mengupayakan dihapuskannya permasalahan Timor Timur dari agenda sidang PBB.

B. Dampak Eksternal Operasi Seroja

Permasalahan yang terjadi di Timor Timur tidak terlepas dari konstelasi politik dunia internasional. Operasi Seroja yang terjadi akibat dari cepatnya perubahan politik di Timor Timur ini berlangsung bersamaan dengan era Perang Dingin. Perang Dingin yang melibatkan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta masing-masing sekutunya kemudian juga merambah ke negara-negara lain dengan masing-masing ideologinya yang saling bertentangan satu sama lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing berebut sekutu dan pengaruh secara global, berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan kemampuan militer, dan berebut memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dari pihak lawan.²⁹ Kedua negara ini saling berebut pengaruh terhadap wilayah-wilayah di dunia. Amerika Serikat lebih banyak berpengaruh di negara-negara Eropa Barat, sedangkan pengaruh Uni Soviet membentang di negara-negara Eropa Timur.³⁰ Sementara di wilayah-wilayah lain, kedua negara ini juga saling berebut pengaruh dengan memberikan bantuan berupa bantuan ekonomi dan pertahanan keamanan.

Amerika Serikat dan Uni Soviet memposisikan mereka sebagai pelindung bagi sekutunya. Hal ini menyebabkan apapun tindakan ataupun keputusan apa saja

²⁹ Ganewati Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27.

yang dilakukan oleh sekutu-sekutunya ini selalu dapat terealisasi atas kompromi bersama-sama dengan negara adidaya tersebut. Tahun 1970 juga merupakan masa ketidak stabilan sumber-sumber energi bagi perindustrian di negara-negara Barat, menyusul embargo minyak oleh negara-negara Arab penghasil minyak.³¹ Indonesia kemudian muncul sebagai salah satu pemasok energi utama. Krisis sumber energi dan ketidakpastian situasi di Asia Tenggara setelah dipukul mundurnya Amerika Serikat keluar dari Vietnam, menjadikan arti penting strategis dan ekonomis Indonesia dalam perspektif global Amerika Serikat meningkat secara signifikan.

Masalah yang terjadi di Timor Timur yang tidak kunjung selesai ini salah satu penyebabnya adalah sikap pemerintah Portugal yang tidak konsisten dari awal proses dekolonialisasi wilayah Timor Timur. Terlebih lagi dengan sikap gubernur Lemos Pires bersama dengan staf-stafnya memilih untuk meninggalkan Timor Timur setelah mengupayakan untuk meredam konflik antar partai-partai yang bersengketa ini tidak berhasil.³² Dr. Almeida Santos juga sempat beberapa kali berkunjung ke Indonesia dan Australia untuk meminta bantuan guna mempertemukan partai yang bersengketa supaya diperoleh kesepakatan damai terhadap yang bersangkutan. Upaya tersebut tidak pernah terwujud, sedangkan di Timor Timur sendiri keadaan semakin tidak menentu, terbukti dari peperangan yang semakin gencar. Setelah Indonesia mengirim

³¹ Rori Permadi U dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 202.

³² *Ibid.*, hlm. 211.

pasukan untuk menghalau pasukan Fretelin di wilayah perbatasan dan membantu rakyat Timor Timur yang menginginkan untuk berintegrasi, pemerintah Portugal berusaha untuk mengajukan permasalahan ini kepada PBB. Laporan yang diberikan Portugal tidak segera ditanggapi oleh PBB, tetapi PBB menyarankan supaya Portugal membicarakan hal tersebut dengan Indonesia dan Australia.

Masuknya pasukan Indonesia ke Timor Timur secara terbuka pada tanggal 7 Desember 1945 ini ditanggapi Portugal dengan pemutusan hubungan diplomatik sehari setelah Operasi Seroja dijalankan.³³ Pemerintah Portugal terus berupaya untuk mempermasalahkan masuknya pasukan Indonesia kepada PBB karena Portugal menginginkan supaya Timor Timur merdeka. Pada tanggal 27 Maret 1976, dalam rapat panitia dekolonialisasi yang dipimpin oleh Presiden Costa Gomes, pemerintah Portugal menyatakan:³⁴

1. Penyesalan terhadap usaha-usaha PBB untuk mempertemukan semua pihak yang bersangkutan di Timor Timur tidak menghasilkan penyelesaian damai.
2. Kecemasan mereka terhadap tawanan-tawanan perang Portugal di Timor Timur.
3. Penyesalan terhadap masih dipertahankannya kehadiran sukarelawan-sukarelawan di Timor Timur.

³³ *Ibid.*,

³⁴ M. Sudibjo (ed), *Indonesia dan Dunia Internasional 1977*, (Jakarta: CSIS, 1978), hlm. 191-192.

Pernyataan dari pemerintah Portugal ini justru dikecam oleh partai-partai yang mendukung integrasi. Pada tanggal 25 Juli 1976, Portugal secara resmi mengakui integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia di Bangkok. Persetujuan ini merupakan hasil perundingan antara wakil gubernur Timor Timur, Lopez da Cruz bersama dengan utusan khusus Presiden Portugal, Morais da Silva yang menyatakan bahwa masalah Timor Timur dengan Portugal sudah selesai karena Timor Timur sudah masuk wilayah Indonesia.³⁵ Melalui pernyataan tersebut, Portugal juga bersedia untuk mencabut kembali persoalan-persoalan Timor Timur di PBB. Mulai saat itu, pemerintah Portugal sudah tidak lagi mencampuri urusan Timor Timur.

PBB merupakan lembaga internasional yang dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Anggota PBB ini beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Terdapat lima negara yang mempunyai hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Cina.

Gerakan kemerdekaan Timor Timur yang berpangkal pada Deklarasi Balibo dilandaskan pada resolusi majelis umum PBB 14 Desember 1960 no. 1514 yang isinya mewajibkan PBB dan anggota-anggotanya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar daerah-daerah jajahan memperoleh kemerdekaan tanpa syarat sesuai

³⁵ *Ibid.*, hlm. 192.

kemauan rakyatnya.³⁶ Menanggapi masalah Timor Timur, dibentuklah sebuah komite yang disebut dengan komite 24. Komite 24 menilai bahwa Timor Timur merupakan *non-self government territory* (wilayah tidak berpemerintahan sendiri), sedangkan menurut Portugal, Timor Timur dianggap sebagai propinsi seberang lautan.

Operasi militer di Timor Timur merupakan pekerjaan serius yang harus diselesaikan oleh PBB karena banyaknya negara-negara yang memprotes tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Permasalahan Timor Timur hingga sekarang-pun masih belum memperoleh kejelasan yang pasti. Masuknya ABRI ke dalam wilayah Timor Timur oleh beberapa negara memang dianggap sebagai invasi dan menuai banyak kecaman. Hal ini yang menyebabkan PBB harus terlibat dalam permasalahan ini. Menanggapi laporan yang diajukan oleh Portugal mengenai campur tangan Indonesia di Timor Timur, Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang berisi:³⁷

1. Menyesali tindakan campur tangan Angkatan Bersenjata Indonesia di Timor Timur.
2. Menyesali sikap pemerintah Portugal yang tidak melaksanakan tanggung jawab administrasi di Timor Timur.

³⁶ Frans S. Fernandes, *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jennderal Pendidikan Tinggi, 1988), hlm. 73.

³⁷ *Ibid.*,

3. Menyerukan agar Indonesia menarik mundur pasukannya dari Timor Timur.
4. Menyerukan kepada sekjen PBB agar mengirimkan utusan untuk menyelidiki dan mengawasi Indonesia dalam melaksanakan resolusi ini.

Bersamaan dengan dikeluarkannya resolusi PBB tersebut, maka sejak tanggal 15 Januari 1976, Vittorio Winspeare Guicciardi bersama dengan kepala kabinetnya, Erik Jensen dan pejabat politik PBB, G.Schittler beserta H.Smage, pembantu administrasi PBB sudah berada di Jakarta untuk meninjau permasalahan yang ada di Timor Timur.³⁸ Tanggal 19 Januari 1976, Guicciardi berangkat ke Kupang dan mengadakan pertemuan dengan Gubernur El Tari dan pejabat-pejabat PSTT di Dili. Sehari setelahnya, Guicciardi mengunjungi daerah-daerah di Timor Timur dan bertemu dengan pejabat pemerintah setempat. Peninjauan yang dilaksanakan oleh Guicciardi memperoleh beberapa hasil yang menguntungkan pemerintah Indonesia, di antaranya:³⁹

1. Adanya kesan yang kuat bahwa secara *de facto* seluruh Timor Timur sudah berada dalam kekuasaan PSTT.
2. Fretelin sudah tidak mempunyai kekuasaan di Timor Timur.
3. Keputusan sidang Majelis Umum PBB tahun 1975 sudah terasa kurang pengaruhnya.

³⁸ M. Sudibjo (ed), *loc.cit.*, hlm. 192.

³⁹ Juli Suroso, *op.cit.*, hlm 85.

4. Adanya keinginan dari anggota Dewan Keamanan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tanggal 17 Nopember 1976, Dewan Keamanan PBB yang menangani masalah dekolonisasi mengesahkan sebuah rancangan resolusi yang menolak tuntutan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Resolusi tahun 1976 no 389 ini menandaskan supaya:⁴⁰

1. Indonesia menarik pasukannya dari Timor Timur.
2. Meminta kepada sekjen PBB agar misinya dilanjutkan.

Menurut hasil pemungutan suara tersebut, 61 negara menyetujui resolusi, 18 menolak, dan 49 negara abstain. Pemerintah Indonesia dengan jelas menentang keras putusan tersebut karena Timor Timur merupakan bagian dari wilayah Indonesia dengan proses dekolonisasi dan kebulatan tekad rakyat Timor Timur sendiri. Masalah Timor Timur dibuka kembali pada tahun 1982 dalam agenda Sindang Umum PBB ke 37 dengan tuduhan bahwa Indonesia telah menganeksasi Timor Timur tanpa memberikan kesempatan kepada rakyat wilayah tersebut untuk menentukan masa depannya secara bebas.⁴¹ Setiap sidang yang membahas masalah Timor Timur, dari lima anggota tetap PBB, hanya Amerika Serikat yang mendukung Indonesia, Cina dan Uni Soviet menentang tindakan Indonesia, sedangkan Perancis dan Inggris memilih untuk abstain. Pada tahun 1983 akhirnya masalah Timor Timur dihapus dari agenda sidang PBB.

⁴⁰ Frans S. Fernandes, *op.cit.*, hlm. 74.

⁴¹ Juli Suroso, *op.cit.*, hlm.86.